

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan metode data panel sebagai alat analisa, data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa tingkat kemiskinan 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat tergolong rendah dengan laju pengurangan angka kemiskinan rata – rata sebesar 2% pertahunnya. Dari hasil analisis model, nampak bahwa pengurangan kemiskinan diiringi dengan peningkatan variabel DAU, DAK, DBH dan PAD yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan penelitian tentang Pengaruh Dana Transfer, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010-2017 antara lain :

1. Pengaruh yang signifikan dan bernilai negatif antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan, yang artinya Dana Alokasi Umum yang di transfer dari pemerintah pusat ke 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Mampunya DAU mengurangi angka kemiskinan bisa menjadi gambaran bahwa penggunaan DAU di Sumatera Barat telah tepat sasaran.

Begitu juga dengan penggunaan Pendapatan Asli Daerah telah optimal karena mampu mendorong turunnya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

2. Pengaruh yang tidak signifikan antara Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap kemiskinan di 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat, yang artinya Dana Alokasi Khusus tidak terlalu mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat. Penggunaan Dana Alokasi Khusus yang belum efisien bisa menjadi alasan kenapa Dana Alokasi Khusus belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat, penggunaan Dana Alokasi Khusus yang difokuskan kepada pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek tentu belum memberikan efek terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Penggunaan Dana Bagi Hasil yang belum optimal mungkin bisa menjadi alasan kenapa Dana Bagi Hasil yang ikut mendorong pendapatan daerah tidak mampu mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Barat.

6.2.Saran

Hasil kesimpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan dan penggunaan dana transfer dan pendapatan asli daerah yang lebih efektif dan efisien agar perekonomian suatu daerah dapat terus membaik.

Adapun saran untuk pemerintah antara lain :

1. Diharapkan adanya peningkatan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya yang akan dialokasikan untuk membantu daerah menandai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar

yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur sehingga mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Mengingat Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator kemandirian sebuah daerah dalam otonomi daerah, maka disarankan untuk dapat menggali potensi-potensi guna peningkatan PAD. Hal ini dapat meningkatkan kontribusi PAD dalam penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat melalui, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer.
3. Dalam penyusunan APBD 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan utama dari daerah tersebut, sehingga dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil daerah dapat berjalan secara maksimal dan terarah.
4. Dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Barat perlu adanya pengawasan yang lebih teliti dari pemerintah pusat terhadap berlangsungnya desentralisasi fiskal. Sehingga dengan pengawasan tersebut proses pembangunan di daerah menjadi lebih terjamin dan terhindar dari penyimpangan, kemudian pada akhirnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan studi dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini. Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu yang lebih jauh agar dapat melihat lebih baik pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengentasan Kemiskinan pada periode pemerintahan yang berbeda-beda.
2. Keterbatasan data membuat variabel penelitian kurang detail dalam menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan, dengan adanya data yang lebih detail seperti besaran penyerapan dana perimbangan dan laporan realisasi penggunaan dana perimbangan akan membuat hasil penelitian lebih baik dalam menjelaskan kebijakan penggunaan apa saja yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di Sumatera Barat.

